



2022

POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Vol.4 No.3, 2022

Potensi Pengembangan *Blue Sukuk* sebagai Pembiayaan Inovatif bagi Sektor Kelautan Indonesia

Mohammad Iqbal Irfany¹, Aam Slamet Rusydiana², Asep Nurhalim¹

¹Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

²Sharia Economic Applied Research dan Training (SMART), Indonesia

iqbal.irfany@apps.ipb.ac.id, +62-822-3000-0125

Isu Kunci

- Sukuk biru (*blue sukuk*) merupakan salah satu instrumen syariah inovatif, berkelanjutan dan potensial bagi sektor kelautan.
- Penguatan regulasi merupakan landasan terpenting dalam pengembangan sukuk biru di Indonesia.
- *Underlying asset*, investor, dan koordinasi antar stakeholder juga merupakan landasan penting lain dalam penerbitan sukuk biru.
- Penguatan aspek di atas bisa menjadikan penerbitan dan pengembangan sukuk biru bisa berjalan lebih solid (*robust*), sesuai syariah, dan berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ringkasan

Risalah ini mengidentifikasi beberapa faktor prioritas dalam penerbitan dan pengembangan Sukuk Biru (*blue sukuk*), sebagai salah satu instrumen keuangan syariah inovatif dan berkelanjutan. Terdapat tiga kriteria pengembangan sukuk biru di Indonesia yakni: (i) aspek atau landasan dalam kerangka pengembangannya; (ii) infrastruktur yang akan digunakan sebagai dasar penerbitannya (*underlying project*); dan (iii) pemangku kepentingan yang terlibat. Risalah ini merekomendasikan urutan landasan terpenting dalam pengembangan sukuk biru adalah: penguatan regulasi, *underlying asset* yang layak, investor, dan koordinasi antar lembaga. Adapun infrastruktur yang potensial menjadi *underlying* penerbitan Sukuk Biru misalnya pengembangan desa nelayan terpadu serta pengadaan kapal nelayan besar yang ramah lingkungan.

Pendahuluan

Permasalahan dalam pengelolaan sektor kelautan sangat kompleks, di samping karena erat keterkaitannya dengan berbagai sektor lain, juga sangat sensitifnya interaksi sektor ini terkait isu lainnya, terutama terkait isu lingkungan (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019). Misalnya saja pengelolaan perikanan tangkap (laut) di Indonesia berpotensi mengganggu ekosistem laut yang muaranya akan mengganggu keberlanjutan pencaharian nelayan, mengganggu ketahanan pangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sebagai dampak eksploitasi ekosistem laut yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

Permasalahan di atas melahirkan konsepsi *blue economy*, yakni konsepsi pemanfaatan sumberdaya perairan secara optimal, berkelanjutan, dengan berbagai upaya inovatif menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Ilma 2017). *Blue economy* pada dasarnya mengarusutamakan efisiensi, dimana investasi tetap didorong dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (pro ekosistem).

Berbagai studi menyatakan sektor ekonomi kelautan masih relatif tertinggal kinerjanya dibanding sektor lain ditinjau dari sisi produktifitas pemanfaatan sumber daya, teknologi, rendahnya investasi, dan aspek lingkungan (Rani dan Cahayasari 2015). Belum lagi bila ditinjau dari profil lainnya seperti tingkat kemiskinan masyarakat pesisir (Juliantono dan Munandar 2016).

Optimalisasi ekonomi laut baik untuk kesejahteraan masyarakat, ketahanan energi maupun sumber pangan di masa depan sangat memerlukan dukungan pembiayaan. Pemerintah perlu melakukan pengembangan instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan ekonomi biru di di Indonesia. Salah satu inovasi sumber pendanaan yang dapat ditempuh adalah

mendorong partisipasi masyarakat berinvestasi pada sektor tersebut melalui instrumen yang disediakan oleh pemerintah seperti sukuk negara (*sovereign sukuk*).

Salah satu instrumen yang telah diterbitkan pemerintah adalah sukuk hijau (*green sukuk*). Sukuk hijau negara pada dasarnya sama dengan jenis sukuk yang diterbitkan pemerintah yang lainnya dimana sebagian besar dana yang diperoleh dari hasil penerbitannya digunakan bagi pembiayaan infrastruktur. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam penerbitan *green sukuk*, infrastruktur yang digunakan sebagai *underlying asset*-nya juga harus dikategorikan sebagai infrastruktur hijau (*green infrastructure*)

Konsep sukuk biru (*blue sukuk*) tidak jauh berbeda dengan *green sukuk*. Perbedaannya adalah sukuk ini lebih fokus pada pembiayaan sektor ekonomi kelautan. Harapannya telaah spesifik terkait kemungkinan penerbitan *Blue sukuk* ini dapat menjadi alternatif inovasi sumber pendanaan bagi sektor maritim di Indonesia.

Beberapa studi terkait pengembangan sukuk dan *blue economy* telah dilakukan. Misalnya Ismatullah (2011) dalam risetnya yang berjudul *Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa Indonesia harus memberanikan diri mengarahkan orientasi pembangunannya pada ekonomi berbasis kelautan. Dalam konteks ini penulis menemukan bahwa khasanah *fiqh* (hukum Islam) pun telah menyoroti masalah-masalah ekonomi kelautan secara intens.

Studi terkait sukuk terutama tema sukuk negara (*sovereign sukuk*) di berbagai negara telah dilakukan, misalnya studi Altaleb dan Alkhatib (2016), Nienhaus dan Karatas (2016), Rahman *et al.* (2017), Arshad *et al.* (2018). Adapun penelitian yang spesifik mengambil area studi di Indonesia misalnya yang dilakukan oleh Mitsaliyandito dan Arundina (2018) yang mengukur dampak pengembangan pasar obligasi dan sukuk negara sebagai salah satu

instrumen pembiayaan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Jarkasih dan Rusydiana (2009) melihat perkembangan pasar sukuk di Indonesia lalu dibandingkan dengan perkembangan di negara tetangga Malaysia dan secara umum di dunia.

Sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, sukuk dapat diterapkan dalam sistem perekonomian yang lebih luas. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus misalnya pada bank syariah (keuangan syariah komersial), namun juga bagaimana sistem ini, sebagai wujud Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*), bisa berkontribusi dalam menanamkan kode etik dalam mempromosikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat luas, termasuk dalam hal ini isu-isu terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Risalah ini mencoba menggali beberapa pertanyaan berikut. Pertama, masalah apa yang dihadapi dalam penerbitan dan pengembangan sukuk biru di Indonesia. Kedua, strategi atau landasan apa yang diperlukan dan krusial dalam rangka pengembangan sukuk biru. Ketiga, setiap ekosistem atau pemangku kepentingan utama mana saja yang terlibat dalam pengembangan sukuk biru di Indonesia.

Pertanyaan di atas dicoba dijawab melalui pendekatan *Interpretive Structural Model* (ISM). Model ini pada dasarnya merupakan satu teknik pengambilan keputusan (*decision making*) dari beberapa kondisi yang kompleks. Dalam hal ini ISM melakukan proses koneksi dan organisasi berbagai ide ke dalam suatu peta gambar (*visual*). Pemodelan dilakukan dengan menggambarkan relasi spesifik antarpeubah, membuat struktur keseluruhannya dimana outputnya berbentuk model grafis kuadran dan level peubahnya (Li dan Yang 2014).

Terdapat kesamaan antara ISM dan *Analytic Network Process* (ANP) dimana keduanya menggunakan ahli suatu bidang (baik dari sisi pengetahuan dan pengalaman praktis) dalam menguraikan sistem kompleks ke dalam

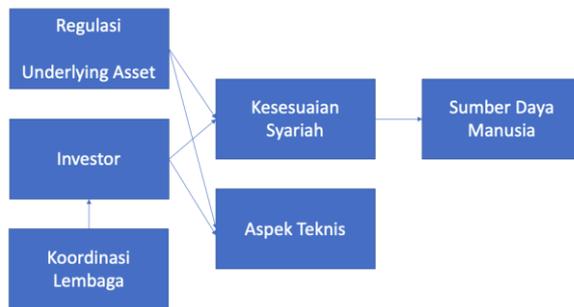
beberapa elemen (sub-sistem) dan model struktural bertingkat. ISM banyak diaplikasikan dalam penelitian manajemen strategis di berbagai bidang dalam membantu simplifikasi pemahaman dasar dari situasi yang rumit untuk kemudian disusun langkah pemecahan masalahnya (Gorvett dan Liu 2007).

Pembahasan

Sebelum ISM diaplikasikan, tahap pertama penelitian dilakukan *brainstorming* (diskusi awal) dengan para ahli untuk menjangkau ide-ide dasar. Para ahli ini di antaranya pakar ekonomi keuangan syariah, pakar *social finance*, dan praktisi pemberdayaan masyarakat (Rusydiana dan Irfany 2021). Hasil *brainstorming* ini berupa beberapa ide atau peubah akhir yang akan diproses dalam analisa selanjutnya.

Struktur jaringan ISM kemudian dikembangkan berdasarkan identifikasi masalah penerbitan sukuk biru di Indonesia. Selanjutnya untuk mengembangkan hubungan kontekstual antar faktor, dilakukan eksplorasi pendapat para ahli. Kemudian dibentuk kelompok ahli dengan menghubungi beberapa akademisi dan praktisi. Untuk mengembangkan model pada awalnya, dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimana diperoleh masukan dari ahli dan merevisi secara bersamaan. Literatur yang sebelumnya dirangkum tentang pengembangan sukuk biru dikomunikasikan kepada para ahli.

Hasilnya, aspek strategi atau landasan dalam pengembangan sukuk biru di Indonesia kemudian diperoleh. Landasan utamanya adalah aspek Regulasi, adanya *Underlying asset*, Koordinasi Investor dan Kelembagaan (Level 3). Landasan berikutnya adalah aspek kepatuhan syariah dan Teknis/operasional (Level 2). Adapun landasan terakhir adalah Sumber Daya Manusia (Level 1).



Gambar 1. Tingkatan Aspek Penting dalam Penerbitan Sukuk Biru (sumber: Rusydiana dan Irfany 2021)

Hasil kajian Rusydiana dan Irfany (2021) mengindikasikan bahwa aspek terpenting dalam penerbitan sukuk biru di Indonesia adalah regulasi. Hasil kajian dalam kasus sukuk biru ini sejalan dengan Jarkasih dan Rusydiana (2010) dalam kasus penerbitan sukuk korporasi, serta Altaieb dan Alkhatib (2016) dalam kasus *sovereign sukuk* pemerintah Yordania. Keduanya menemukan bahwa regulasi merupakan aspek terpenting dalam penerbitan dan pengembangan sukuk masing-masing kasus.

Aspek terpenting kedua adalah *underlying asset*. Aspek ini juga sangat krusial karena begitu sukuk biru diterbitkan, dibutuhkan proyek-proyek nyata yang layak untuk dibiayai. *Underlying asset* misalnya bisa berupa pembiayaan infrastruktur dermaga, atau pengadaan kapal penangkap ikan (Kadir dan Laapo 2016). Berdasarkan wawancara mendalam dengan para ahli dari Kementerian Keuangan, proyek yang mendasarinya juga dapat berupa pengembangan desa nelayan yang terintegrasi. Hal yang disebut ini bahkan bisa mendukung “infrastruktur tol laut” yang dicanangkan pemerintah.

Aspek penting lainnya adalah terkait investor. Mirip dengan kisah sukses penerbitan *green sukuk*, penerbitan *blue sukuk* memungkinkan semua investor publik, baik domestik maupun internasional (seperti dari negara-negara Arab, Eropa dan negara lain) untuk bisa berpartisipasi. Menariknya sukuk biru di Indonesia bahkan berpeluang menjadi sukuk biru pertama dan satu-satunya di dunia, dimana

belum pernah ada instrumen pembiayaan serupa di negara lain sebelumnya (Rusydiana dan Irfany 2021).

Aspek lain yang juga penting dalam pengembangan sukuk biru adalah koordinasi antarlembaga. Dalam hal ini terdapat beberapa instansi pemerintah yang berkepentingan dalam penerbitan dan pengembangan sukuk biru di Indonesia, antara lain Kementerian Keuangan (sebagai penerbit), Kementerian Kelautan dan Perikanan (dalam mendukung proyek-proyek yang mendasarinya), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (dalam melakukan studi kelayakan awal). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mungkin juga berkepentingan untuk mengembangkan infrastruktur maritim (Hariyanto 2019).

Terkait dengan unsur-unsur yang mendasari proyek penerbitan sukuk biru di Indonesia, terdapat beberapa opsi sebagai berikut: (a) pengembangan desa nelayan terpadu, (b) pengadaan kapal penangkap ikan besar, (c) konservasi kelautan dan perikanan. ekosistem maritim, (d) infrastruktur “tol laut”, dan (e) pembangunan dermaga, dan sebagainya.

Terkait dengan pemangku kepentingan sukuk biru di Indonesia, aktor penting adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah atau regulator dalam hal ini Kementerian Keuangan; dan (b) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat *stakeholder* lain yang juga terlibat dalam sukuk biru syariah di Indonesia yakni sebagai berikut: (a) Bappenas, (b) Investor publik, (c) Komunitas nelayan, dan (d) lembaga keuangan syariah.

Implikasi dan Rekomendasi

Sukuk biru di Indonesia secara umum memiliki potensi yang cukup besar untuk diterbitkan dan dikembangkan di masa mendatang. Berdasarkan analisis, aspek-aspek penting dalam pengembangan sukuk biru adalah: aspek regulasi, proyek-proyek dasar (*underlying asset*) yang layak, investor, dan

koordinasi antar lembaga. Kemungkinan infrastruktur yang mendasari sebagai dasar penerbitan sukuk biru adalah pengembangan desa nelayan terpadu, dan pengadaan kapal nelayan besar dan ramah lingkungan. Pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan sukuk biru adalah lembaga pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bappenas), investor, dan komunitas perikanan.

Mekanisme dan lembaga keuangan syariah akan sangat berperan penting dalam konteks penerbitan dan pengembangan sukuk biru Indonesia ke depan. Jika berjalan lancar, penerbitan sukuk biru sebagai instrumen pembiayaan syariah yang inovatif di Indonesia bisa menjadi pionir sukuk biru pertama (dan mungkin satu-satunya) di dunia.

Seperti tertuang dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024 (Kementerian PPN/Bappenas 2018), pemerintah saat ini sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya membangun sukuk sebagai salah satu instrumen inovatif dan potensial dalam pembangunan. Dengan demikian, regulasi dan ekosistem pendukung diperlukan dalam memfasilitasi perkembangan penerbitan sukuk biru di masa mendatang. Aspek lain seperti *underlying asset*, investor dan koordinasi antar stakeholder juga tidak bisa dikesampingkan dalam membangun instrumen sukuk biru sehingga bisa berjalan lebih solid (*robust*), sesuai syariah (*sharia compliant*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

Daftar Pustaka

Altaleb GS, Alkhatib AY. 2016. "Sovereign Islamic sukuk and the economic development: A case study of Jordan". *European Journal of Business and Management*. 8 (32) : 115-118.

Anggraini Y. 2018. "Peran green sukuk dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global". *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. 1(2): 251-268.

Arshad H, Muda R, Osman I. 2018. "Impact of exchange rate and oil price on the yield of sovereign bond and sukuk: Evidence from Malaysian capital market", *Journal of Emerging Economies dan Islamic Research* . 5(4): 27-41.

Faisal MN, Al-Esmael BA. 2014. "Modeling the enablers of organizational commitment", *Business Process Management Journal*. 20(1): 25-46.

Gorvett R, Liu N. 2007. *Using interpretive structural modeling to identify and quantify interactive risks*. Orlando –USA: ASTIN Colloquium.

Ilma AFN. 2017. "Blue Economy: Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan". *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*. 14(1).

Ismatullah R. 2011. "Paradigma ekonomi kelautan dalam perspektif ekonomi Islam: Reinterpretasi Ayat-ayat Kelautan yang Berdimensi Ekonomi". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. 1(2): 95.

Jabeen F, Faisal MN. 2018. "Imperatives for improving entrepreneurial behavior among females in the UAE: An empirical study and structural model", *Gender in Management: An International Journal*. 1754-2413.

Jabeen F, Faisal MN, Katsioloudes MI. 2017. "Entrepreneurial mindset and the role of universities as strategic drivers of entrepreneurship evidence from the UAE", *Journal of Small Business and Enterprise Development*. 24 (1): 136-157.

- Jarkasih M, Rusydiana AS. 2009. "Perkembangan pasar sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia dan dunia", *Antisipasi: Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 1 (2).
- Juliantono FJ, Munandar A. 2016. Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*.12(2).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. *Permen KP Nomor 63 Tahun 2017 tentang : Rencana Strategis Kementerian kelautan Tahun 2015 - 2019*.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2018. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta (ID), Kementerian PPN/Bappenas.
- Lee DM. 2007. *Structured Decision Making with Interpretive Structural Modelling (ISM)*. Canada: Sorach Inc.
- Li M, Yang J. 2014. "Analysis of interrelationships between critical waste factors in office building retrofit projects using interpretive structural modeling". *International Journal of Construction Management*. 14(1): 15-27.
- Mitsaliyandito RQ, Arundina T. 2018. "Dynamic relationship between sovereign bond and sukuk market developments in Indonesia". *Pertanika Journal of Social Sciences dan Humanities*. 26: 27-38.
- Nienhaus V, Karatas A. 2016. "Market perceptions of liquid sovereign sukuk: A new asset class?", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 9 (1).
- Rahman MP, Duasa J, Kassim S, Zainudin WRA. 2017. "Sovereign sukuk pricing analysis: Do macroeconomic variables matter?". *International Journal of Economics, Management and Accounting*. 25(3): 513-528.
- Rani F, Cahayasari W. 2015. "Model Blue Economy di Kawasan Asia Pasifik (Studi Kasus: Penerapan Model Blue Economy pada Industri Perikanan Indonesia)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 2(1).
- Ravi V. 2015. "Analysis of interactions among barriers of eco-efficiency in electronics packaging industry", *Journal of Cleaner Production*. 101: 16-25.
- Rusydiana AS, Irfany MI. 2021. Proposing Blue Sukuk in Indonesia: An Interpretive Structural Model. *Shirkah: Journal of Economics and Business*. 6(1): 101-114.



**Direktorat
Publikasi Ilmiah
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

